



BAB V

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Nyata Permasalahan Pengelolaan SD di Kota Banda Aceh Pasca Gempa dan Tsunami

1. Kerusakan Komponen Pengelolaan SD Di Banda Aceh

Bencana dapat memberi dampak terhadap fisik dan psikososial korban dan juga orang-orang lain yang berdekatan dengan lokasi kejadian. Dengan perspektif ini, dan sejalan dengan pandangan Rice (1999) bahwa korban selalu mendapati diri mereka berada dalam suasana tidak nyaman, kekurangan dan gangguan fisiologi. Selain itu, jangka masa untuk memberikan, pemulihan kembali dampak bencana, kekhawatiran pribadi akan bencana yang mungkin terjadi lagi, pemindahan ke lokasi baru yang memerlukan masa untuk menjadi tempat yang permanen, pembangunan kembali rumah dan infrastruktur yang hancur, penjagaan karena sakit atau anggota keluarga yang cedera, dan pengurusan berbagai kebutuhan keluarga memerlukan dan menggunakan sejumlah energi fisik dan psikologikal yang tiada taranya.

Kerugian tersebut berupa kerusakan fisik dan kehilangan penghasilan. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas, Sri Mulyani Indrawati, merinci, kerusakan fisik yang terjadi sebesar 2,924 miliar dolar AS. Kerusakan itu terbagi dalam sektor sosial berupa perumahan, sarana pendidikan, sarana kesehatan, dan sarana keagamaan serta kebudayaan. Di sektor infrastruktur berupa sarana transportasi, komunikasi, energi, air dan sanitasi, serta

pengontrol banjir. Sementara di bidang produktif berupa pertanian, perikanan, serta industri dan perdagangan.

Sementara untuk kerusakan fisik ada 1,3 juta rumah dan bangunan yang hancur, delapan pelabuhan dan empat tempat penampungan bahan bakar, 85 persen sistem air dan 92 persen sanitasi rusak. Jalan sepanjang 120 km dan 18 jembatan juga luluh lantang. Tahap rehabilitasi dan rekonstruksi perlu waktu 1,5-2 tahun untuk memulihkan standar pelayanan minimum. Tahap rehabilitasi dan rekonstruksi yang bertujuan membangun kembali seluruh sistem ekonomi, transportasi, telekomunikasi, sosial budaya, pendidikan dan kelembagaan akan memakan waktu lima tahun". (Tempo, Rabu, 05 Januari-Selasa, 18 Januari 2005).

Kerusakan infrastruktur lainnya khususnya bidang pendidikan, lebih kurang 50% bangunan sekolah di Bada Aceh hancur diterjang gelombang tsunami. Kondisi bangunan sekolah di Kota Banda Aceh yang hancur antara lain 59 gedung sekolah hancur total, 17 rusak berat, 39 rusak ringan. Russel G. Davis dan Barclay Hudson (1980) perencanaan kependidikan memiliki tiga pendekatan dasar yang digunakan di tingkat nasional, namun ada juga yang menambahkan pendekatan keempat yaitu di sini pada tingkat: (1) perkiraan tuntutan sosial; (2) perencanaan tenaga kerja; (3) analisis keuntungan (*rate of return analysis*); dan (4) analisis efektifitas biaya (*cost-effectiveness analysis*). Sebagian besar para perencana menggabungkan metode-metode mereka, seorang perencana dalam bidang pendidikan akan menggunakan pendekatan terhadap tugasnya secara berbeda-beda bergantung pada apakah ia memandang pembangunan dan pendidikan dari sudut pandang neoklasik/ kapitalis, mereka dapat menggunakan

peramalan jumlah penduduk untuk menetapkan sasaran-sasaran demografi atau sasaran sosial, peramalan ekonomi untuk meletakkan tuntutan tenaga kerja, analisis efektifitas biaya untuk mengevaluasi proyek-proyek utama dan lebih jarang lagi, analisis keuntungan untuk menambah pendekatan-pendekatan lain.

Dalam pasal 35 Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara, berencana dan berkala. Standar nasional pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan.

Standar isi mencakup ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan ke dalam persyaratan tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.

Kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan standar nasional yang telah disepakati. Standar tenaga kependidikan mencakup persyaratan pendidikan prajabatan dan kelayakan, baik fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan.

Standar sarana dan prasarana pendidikan mencakup ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat

bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, dan sumber belajar lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Peningkatan secara berencana dan berkala dimaksudkan untuk meningkatkan keunggulan lokal, kepentingan nasional, keadilan, dan kompetisi antar bangsa dalam peradaban dunia.

Rencana strategis untuk situasi darurat sangat didasarkan pada asumsi dan aspirasi. Akan tetapi, rencana strategis itu memberikan kerangka kerja untuk perumusan kebijakan, alokasi sumber daya dan implementasi program. Rencana akan sangat bervariasi sesuai dengan skenario yang ada.

Bencana dapat memberi dampak terhadap fisik dan psikososial korban dan juga orang-orang lain yang berdekatan dengan lokasi kejadian. Dengan perspektif ini, dan sejalan dengan pandangan Rice (1999) bahwa korban selalu mendapati diri mereka berada dalam suasana tidak nyaman, kekurangan dan gangguan fisiologi. Selain itu, jangka masa untuk memberikan pemulihan kembali dampak bencana, kekhawatiran pribadi akan bencana yang mungkin terjadi lagi, pemindahan ke lokasi baru yang memerlukan masa untuk menjadi tempat yang permanen, pembangunan kembali rumah dan infrastruktur yang hancur, penjagaan karena sakit atau anggota keluarga yang cedera, dan pengurusan berbagai kebutuhan keluarga memerlukan dan menggunakan sejumlah energi fisik dan psikologikal yang tiada taranya.

Bencana telah membuka pintu kemanusiaan. Bencana telah menerabas batas-batas negara. Bencana telah menghapus perbedaan bangsa, perbedaan warna kulit. Bencana telah membongkar keangkuhan dan kesombongan manusia. Nilai-

nilai humanisme telah membuat orang *akil-balig*. Keakilbaligan itu telah membuat orang ikut membawa dan membantu orang lain memperoleh kemanusiaannya sendiri. Keakilbaligan telah membawa manusia untuk bersikap sosial dan solidaritas. Lihatlah apa yang terjadi Banda Aceh, untuk membangun SD yang rusak dibangun oleh berbagai Lembaga donor bik dalam negeri maupun luar negeri.

Banda Aceh mengalami kesulitan membiayai pendidikan dasar bagi anak-anak usia sekolah dasar, maka harus diusahakan ada dukungan eksternal yang penuh bagi kamp atau pemukiman pengungsi. Rencana yang dibuat harus dengan jelas menunjukkan mengapa dukungan semacam itu harus terus ada karena pihak donor terus-menerus berupaya mengurangi pendanaan bagi program pengungsi ketika krisis telah berlalu. Rencana tersebut juga hendaknya memuat kontribusi yang diberikan oleh negara bagi kesejahteraan pengungsi, misalnya tempat tinggal dengan kondisi lingkungan yang laik (seringkali wilayah yang menerima pengungsi merupakan bekas hutan gundul dan lingkungannya tidak baik), dan hendaknya mencari sumber daya negara yang dialokasikan bagi pendidikan pengungsi, misalnya lahan untuk sekolah, penggunaan infrastruktur pendidikan, jumlah pengungsi di lembaga pendidikan di satu daerah, dan peranan otoritas pendidikan nasional dalam hal bimbingan dan koordinasi.

Rencana tersebut hendaknya menyebutkan bagaimana nantinya perkembangan dukungan negara terhadap pendidikan pengungsi selama periode rencana berjalan. Ini termasuk meningkatkan usaha untuk mengatur pengakuan resmi dari pendidikan yang telah dirampungkan dan hasil pengujiannya. Juga

termasuk kesempatan melanjutkan pendidikan bagi pengungsi yang terpilih dan antara pendidikan guru bagi guru pengungsi.

Para donator harus diingatkan tentang perlunya meneruskan dukungan terhadap biaya operasional program pendidikan pengungsi. Tanpa dukungan ini, tujuan pendidikan untuk semua orang tidak akan tercapai. Selain itu, yang juga harus disebutkan ialah bahaya friksi antara pengungsi dan penduduk lokal di wilayah-wilayah pengungsi. Para donor hendaknya diminta untuk mendanai proyek pembangunan pendidikan lokal untuk wilayah-wilayah seperti itu agar sesuai dengan standar nasional (seringkali permukiman pengungsi berada di wilayah yang miskin pembangunan dan kualitas pelayanan lokalnya memprihatinkan, biasanya karena pemerintahan daerah yang payah; ini menciptakan perbedaan yang kontras antara program pengungsi yang efisien tapi berbiaya rendah dan program setempat). Rencana aksi harus membuat program untuk pembangunan pendidikan di wilayah-wilayah pengungsi, menetapkan spesifikasi jenis bantuan yang diperlukan (ruang kelas, asrama, perlengkapan, materi ajar, sekolah, lembaga pelatihan guru, pusat kejuruan) dengan berdasarkan pada survey lapangan.

Ketika permukiman pengungsi lokal yang permanen sudah direncanakan maka harus dibuat proyeksi realistis tentang biaya pendidikan yang akan didanai oleh pemerintah dan pengungsi itu sendiri kelak pada saat bantuan dana sudah dihentikan. Rencana aksi harus membuat asumsi logis tentang kapan pengungsi akan kembali ke rumah asal mereka, dan menggambarkan sumber daya yang dibutuhkan untuk itu. Rencana aksi juga harus memeriksa masalah-masalah

organisasional yang ditimbulkan oleh penelantaran dan persiapan yang kelak diperlukan untuk reintegrasi saat mereka kembali.

Diperlukan adanya survey tentang tidak terpenuhinya kebutuhan pendidikan bagi pengungsi di wilayah Banda Aceh, serta bagi pengungsi diluar Banda Aceh yang akan kembali daerah asalnya dan pendatang menyertai orang tuanya sebagai tenaga kerja dari daerah lain serta anak-anak jalanan. Rencana aksi harus memastikan bahwa semua anak dapat menikmati hak mereka atas pendidikan, termasuk mereka yang terlalu miskin untuk mengambil inisiatif pendidikan bagi anak-anak mereka. Ukuran-ukuran kualitatif (semisal persyaratan masuk yang disederhanakan dan mekanisme di luar jangkauan) dan ukuran kuantitatif (ketentuan bagi tempat sekolah) harus juga termasuk di dalamnya.

Meskipun sulit dimasukkan ke dalam rencana aksi, pengembalian pengungsi ke tempat asal mereka pada esensinya merupakan usaha untuk memperkuat kapasitas administratif dan infrastruktur pendidikan di wilayah-wilayah yang menerima orang-orang yang kembali itu (ini lebih rumit bagi wilayah yang benar-benar tidak didiami dan/atau tidak aman dibandingkan wilayah yang masih ada pendidikan). Harus ada kolaborasi dengan otoritas pendidikan dan/atau badan PBB dan organisasi non-pemerintah yang memberikan dukungan terhadap pendidikan orang-orang pengungsi untuk memperoleh gambaran yang paling mungkin tentang skenario dan kebutuhan untuk kembali. Juga perlu diatur masalah penghargaan atas hasil studi yang diselesaikan oleh siswa dan pelatihan yang diterima oleh para guru.

2. Pengelolaan PBM pada SD Di Banda Aceh

Kurikulum sebagai suatu dokumen (suatu rencana tertulis) secara mendasar bersifat pasif, tidak berdaya (*inertia*). Untuk mengejawantahkan ide, tujuan, materi dan proses kurikulum tersebut diperlukan pengembangan lebih lanjut oleh guru, dalam bentuk perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran di kelas maupun di luar kelas. Melalui perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran inilah diharapkan kurikulum dapat menimbulkan suatu interaksi yang sistemik dan dinamis di antara guru, murid, materi dan media pelajaran.

Interaksi antara murid, guru, materi dan media diorientasikan untuk mengembangkan pengetahuan, kemauan dan kemampuan siswa, sehingga terjadi proses pengembangan pada dirinya dari suatu tingkatan pengalaman/penghayatan, pengungkapan, pengolahan/analisis, penafsiran/penyimpulan, sampai kepada tingkatan penyerapan atau penarapan. Proses tersebut haruslah menjadi suatu proses yang dibiasakan, karena dalam interaksi itulah guru melakukan kegiatan fasilitasi (*facilitation*) kepada siswa untuk memiliki pengetahuan, kemauan dan kemampuan sebagaimana tuntutan kurikulum. Dalam konteks inilah guru memiliki peranan sebagai manajer pembelajaran.

Tugas guru sebagai manajer pembelajaran tidak hanya sekedar mengembangkan isi dan muatan kurikulum dan strategi pembelajaran, tetapi mencakup langkah-langkah taktis untuk menyelaraskan antara proses belajar yang dilakukan siswa dengan proses mengajar yang dikembangkan guru di satu pihak, dan di pihak lain akan berkaitan dengan tujuan program sekolah. Oleh karena itu, manajemen pembelajaran akan berhubungan pula dengan tugas dan fungsi kepala

sekolah dan para pengawas. Keterpaduan peran ketiga personil ini, akan turut “mewarnai” situasi dan kondisi iklim (suasana) berlangsungnya proses pembelajaran pada siswa di dalam kelas.

Secara umum tidak ada perbedaan mendasar antara proses manajemen kurikulum dengan proses manajemen kelas yang dilakukan guru. Hal yang membedakan di antara keduanya terletak pada intensitas pengkajian terhadap aspek kompetensi yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan siswa dan lingkungan belajar yang memberikan situasi dan kondisi yang mendukung proses belajar siswa.

Manajemen pembelajaran, diartikan sebagai proses dan prosedur yang digunakan guru dalam membantu memfasilitasi siswa mencapai tujuan belajar melalui upaya pengaturan situasi dan kondisi (suasana) belajar yang menyenangkan siswa dengan efektif dan efisien. Tujuan pembelajaran adalah: (1) Mengetahui dan lebih akrab dengan lingkungan alam, sosial dan budaya, agar sanggup melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai luhur setempat dalam rangka menunjang pembangunan nasional. (2) Memiliki keterampilan dasar, keterampilan untuk kehidupan dan keterampilan untuk penghasilan sesuai dengan potensi unggulan setempat, dan (3) Menyadari lingkungan dan masalah-masalah yang ada di masyarakat serta dapat membantu mencari pemecahannya.

Keberhasilan proses pembelajaran dapat ditentukan oleh ketersediaan dan kreativitas guru dalam memanfaatkan berbagai bahan pembelajaran. Selanjutnya faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam menyeleksi bahan dan sumber belajar siswa dalam pembelajaran di SD adalah, (a) tujuan yang harus dicapai oleh

siswa, (b) tingkat pertumbuhan dan perkembangan siswa (c) kemampuan membaca siswa, (d) tingkat kesulitan konsep yang terdapat dalam pembelajaran, dan (e) latar belakang pengalaman siswa. Kelima, faktor di atas, harus menjadi bahan pertimbangan utama, sebelum guru menentukan bahan dan media belajar yang akan digunakan.

Secara umum, media pembelajaran ke dalam 2 bentuk, yaitu media masa dan peta/globe. Media masa merupakan bahan yang dapat mendukung terhadap keberhasilan proses pembelajaran. Selain media masa dapat dijadikan muatan kurikulum juga merupakan bahan yang mengandung berbagai isi pelajaran seperti sejarah, ilmu politik, sosiologi dan lain sebagainya.

Hal yang termasuk ke dalam media masa sebagai bahan pembelajaran diantaranya surat kabar, majalah dan buku sebagai media masa cetak, televisi, radio, internet sebagai media masa dalam bentuk elektronik. Media masa dalam bentuk bahan cetak seperti surat kabar, majalah dan buku, begitu pesat perkembangannya. Bukan saja bentuk media masa seperti ini memiliki keunggulan, yaitu dapat menjangkau semua lapisan masyarakat, serta tidak terbatas oleh ruang dan waktu, tetapi juga media cetak semacam ini dapat menyuguhkan berbagai informasi sosial secara detail, sehingga berbagai ulasan, isu, peristiwa yang terjadi dapat dianalisis secara mendalam. Oleh karena itu keberadaan media masa dapat digunakan untuk menunjang keberhasilan pembelajaran khususnya dalam bidang sosial.

Selain media masa cetak, perkembangan media masa elektronik seperti radio, televisi dan internet juga tidak kalah pesatnya. Media masa elektronik

memiliki kelebihan dibandingkan dengan media masa cetak. Kelebihan tersebut selain media elektronik dapat menyajikan informasi lebih cepat juga bentuk penyajiannya yang lebih menarik, oleh karena dapat menyajikan gambar hidup. Oleh karena itu media masa elektronik dianggap dapat menunjang keberhasilan proses pembelajaran siswa khususnya dalam studi sosial. Untuk kepentingan pembelajaran, guru dapat memanfaatkan program-program televisi baik program televisi komersial yang banyak menyajikan berbagai kejadian penting yang ditayangkan hampir setiap waktu, maupun program televisi yang didesain untuk kebutuhan pembelajaran.

Peta atau globe merupakan bagian penting dalam pelajaran. Peta dapat menunjukkan berbagai data tentang tempat atau lokasi suatu daerah, ukuran atau luas wilayah, ketinggian suatu daerah dan lain sebagainya. Semua itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pembelajaran. Oleh karena itu peta atau globe dapat berfungsi sebagai alat bantu untuk menyampaikan berbagai informasi penting, harus dipahami dan dipelajari oleh siswa. Secara umum, mempelajari peta dalam belajar adalah agar siswa dapat: (1) melukiskan apa yang digambarkan oleh peta, (2) Melihat hubungan dan menyimpulkan apa yang disajikan dalam peta, (3) Memiliki pengetahuan apa yang dilukiskan dalam peta, (4) Memiliki kemampuan untuk menterjemahkan simbol-simbol yang ada dalam peta, (5) Memiliki kebiasaan menggunakan peta sebagai petunjuk dan sumber informasi.

Khusus berkenaan dengan proses manajemen pembelajaran dalam konteks penerapan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), paling tidak akan dipengaruhi oleh aspek tujuan, kondisi atau kemampuan awal siswa (*entry*

behavior) dan konteks atau situasi dan kondisi nyata dari lingkungan belajar siswa. Manajemen pembelajaran yang mengakomodasikan ketiga aspek itulah dapat dijadikan dasar operasional dalam mengembangkan program pembelajaran KTSP.

Seperti yang disebutkan bahwa manajemen pembelajaran (baik pembelajaran KTSP pendekatan monolitik maupun terpadu) akan menyangkut proses belajar dan proses mengajar. Guru yang akan mengajar seyogyanya mengembangkan proses belajar berdasarkan apa yang dipelajari siswa. Guru tidak mungkin lagi menentukan metode mengajar apa yang akan digunakannya tanpa mengetahui proses belajar yang akan ditempuh siswa untuk: menguasai materi tertentu, melaksanakan proses tertentu, mengembangkan kemampuan berfikir tertentu atau mengembangkan kemampuan sosial tertentu.

Dalam menentukan cara belajar yang akan dilakukan siswa didasarkan pada pertimbangan profesional guru mengenai: sifat tujuan, materi, kemampuan awal siswa (*entry behavior*), sifat sumber belajar dan lingkungan atau suasana belajar. Berdasarkan data yang dimiliki guru tentang aspek-aspek tersebut maka guru mengambil keputusan profesional mengenai cara belajar yang akan dilakukan siswa. Atas dasar keputusan itulah guru menentukan cara mengajar yang akan dilakukannya, sehingga siswa dapat melakukan proses belajar yang diputuskannya secara maksimal.

Manajemen pembelajaran menurut KTSP berdasarkan rujukan karakteristik tujuan pembelajaran. Manajemen ini perlu dikembangkan secara spesifik jika akan diterapkan pada bidang kajian/mata pelajaran tertentu baik pada

pendekatan monolitik maupun integratif. Khusus pada pendekatan integratif formulasi tujuan pembelajarannya perlu mempertimbangkan tujuan pembelajaran bidang kajian/mata pelajaran yang akan diintegrasikannya.

Strategi umum pembelajaran yang dapat dikembangkan ialah: *Pertama*, penerapan pembelajaran aktif dan kreatif. Contoh: (1) untuk budaya lokal siswa menghayati, ikut serta didalamnya misalnya menghadiri upacara-upacara budaya. (2) untuk pendidikan lingkungan siswa melakukan identifikasi tentang potensi hayati di lingkungannya.

Kedua, pendayagunaan potensi dan sumber daya setempat sebagai sumber belajar. Contoh: (1) sentra produksi atau jasa yang ada sebagai sumber belajar tentang proses produksi. (2) bahan-bahan atau benda di lingkungan sekitar, misalnya: tanaman spesifik/khas setempat dikaji dalam mata pelajaran biologi, tokoh pahlawan setempat, tokoh usahawan sukses daerah sebagai sumber belajar dalam hal sikap kepahlawanan dan kemandirian.

Ketiga, penanaman sikap melalui penghayatan terhadap suatu proses, situasi dan kondisi aktual yang terjadi di lingkungannya. Contoh: (1) bencana alam yang sering dialami di lingkungannya. (2) ketentraman yang terjadi di lingkungannya sebagai akibat dari sikap gotong royong dan toleransi yang masih di anut masyarakat.

Keempat, membangun jaringan kerjasama fungsional antara sekolah dengan masyarakat lingkungan sekolah, pemerintah daerah, instansi/organisasi dan dunia usaha terkait untuk pendukung: (1) pendanaan, (2) penyediaan tenaga

ahli, (3) penyediaan sarana dan prasarana pembelajaran, dan (4) hal lainnya yang menunjang keberhasilan pelaksanaan pembelajaran.

Merujuk pada tujuan pembelajaran, maka proses pembelajarannya lebih menekankan pada pembelajaran aktif bagi siswa di mana situasi dan kondisi lingkungan kehidupan siswa dan sekolah dijadikan stimulus dan sumber belajar. Pola atau pendekatan pembelajaran cenderung akan lebih banyak dilaksanakan pada setting pembelajaran di lingkungan kehidupan siswa dan sekolah dari pada setting pembelajaran di ruang kelas. Hal ini terkait dengan tujuan dan manajemen pembelajaran yang memang cenderung mendekatkan proses dan hasil belajar yang dilakukan dan dihasilkan siswa dengan situasi, kondisi, masalah, potensi dan sumber daya aktual yang terjadi dan dimiliki di lingkungan kehidupannya.

Proses pembelajaran akan terliput di dalamnya pembahasan model, pendekatan dan metode pembelajaran. Pada penetapan proses pembelajaran, di samping tetap mempertimbangkan prinsip belajar siswa, prinsip mengajar dan aspek pertimbangan pemilihan metode belajar. Hal penting lainnya yang patut dipertimbangkan adalah pemahaman tentang situasi dan kondisi lingkungan yang menjadi sumber bahan pembelajaran. Hal ini menjadi penting karena akan memberikan kejelasan tentang bahan yang akan dimasukan ke dalam pembelajaran.

Berikut ini beberapa alternatif proses pembelajaran yang dapat digunakan dalam manajemen pembelajaran KTSP. Proses pengalaman berstruktur di lingkungan pendidikan luar sekolah lebih dikenal dengan istilah 'Daur



Pengalaman', terdiri dari lima langkah. Setiap langkah ada tujuan yang hendak dicapai dan untuk itu ada serangkaian kegiatan belajar.

Kelima langkah itu adalah: (1) Pengalaman atau penghayatan, yaitu dimulai dengan pengalaman yang telah ada dari warga belajar atau dibuat agar warga belajar mengalami dan menghayati sesuatu yang akan dipelajari. (2) Pengungkapan, yaitu warga belajar mengungkapkan atau menampilkan apa yang telah dialaminya atau dihayatinya. (3) Pengolahan atau analisis, yaitu warga belajar mengolah atau menganalisis apa yang dialami dan diungkapkan tersebut. (4) Penyimpulan, yaitu warga belajar menyimpulkan apa yang telah diolah atau dianalisis tersebut, baik tentang isi topik belajarnya maupun nilai manfaat bagi dirinya. (5) Penerapan atau penyerapan, yaitu warga belajar menerapkan pengalaman belajar yang telah disimpulkan itu atau menyerapnya sebagai bekal bagi dirinya.

3. Kebijakan Pemerintah Dalam Pengelolaan SD di Banda Aceh Pasca Gempa dan Tsunami

Membangun kembali persekolahan di Banda Aceh diperlukan kerja keras dan tentunya biaya yang begitu besar. Pengelolaan persekolahan di Banda Aceh dalam situasi darurat pasca gempa dan tsunami dilakukan oleh berbagai instansi/lembaga pemerintah maupun swasta, dalam negeri maupun luar negeri, yang menggunakan sistem dan metode masing-masing sesuai dengan kemampuan yang dimiliki masing-masing lembaga penyelenggara.

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah membuka peluang kemudahan bagi setiap donator melakukan langkah-langkah pembangunan pendidikan baik

pisik maupun nonpisik, dalam bentuk bekerjasama dan berkoordinasi dengan lembaga nonpemerintah lokal, nasional dan internasional

Kebijakan pemerintah daerah dalam menangani jumlah anak usia sekolah di wilayah tersebut yang tidak bersekolah, kegiatan sekolah untuk membawa anak-anak tersebut masuk sekolah, mencegah terjadinya putus sekolah, dan program sekolah untuk membantu anak-anak kelas awal SD ialah membangun pendidikan di NAD, dalam situasi darurat pasca gempa dan tsunami, telah dilakukan dengan cara liris birokrasi.

Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah membuka peluang kemudahan bagi setiap donatur untuk melakukan langkah-langkah pembangunan pendidikan baik fisik maupun nonfisik, dalam bentuk bekerjasama dan berkoordinasi dengan lembaga non pemerintah lokal, nasional dan internasional.

Pemerintah mengalami kesulitan untuk menyelenggarakan pendidikan di wilayah-wilayah yang dilanda gempa dan tsunami, ketidakamanan, dan instabilitas. Pendidikan kadang-kadang dapat dilanjutkan jika si pendidik adalah orang yang terlatih dengan baik dan memiliki komitmen. Di Sarajevo, kegiatan belajar mengajar di selenggarakan di bawah tanah di awal tahun 1990an.

Beberapa usaha internasional yang menonjol dalam mendukung kegiatan belajar mengajar pada daerah yang dilanda gempa dan tsunami adalah penyebaran bahan-bahan pendidikan dan pengembangan pendekatan pembelajaran terbuka terhadap pendidikan guru di Somalia; dan dukungan pada sekolah-sekolah sementara di Angola. Sebuah contoh luarbiasa adalah Operasi Bantuan Sudan

yang dipimpin oleh UNICEF melalui kerjasama dengan beberapa NGO/LSM, yang memberikan bantuan lintas batas untuk pemberian pendidikan di Sudan Utara yang terpecah karena perang, diantaranya bahan-bahan pendidikan dan pelatihan guru.

Dalam usaha untuk mengembalikan akses pendidikan, seringkali dihadapkan dengan keterbatasan sumberdaya, yang dapat termasuk kekurangan personil dan perlengkapan untuk merencanakan dan mengkoordinasikan proses rekonstruksi. Juga adanya diskriminasi terhadap kelompok atau wilayah tertentu. Untuk menteri pendidikan di daerah yang dilanda gempa dan tsunami atau yang menampung para pengungsi, adalah penting untuk mengetahui kewajiban-kewajiban mereka menurut hukum internasional untuk memastikan akses terhadap pendidikan dan tidak menghambat PBB dan organisasi-organisasi sukarela untuk membantu akses tersebut jika mengalami kekurangan sumber daya. Badan-badan PBB, NGO dan para peneliti sebaiknya bersikap waspada di situasi-situasi dimana akses pendidikan diabaikan, yang kadang-kadang tanpa disengaja, untuk membuat pemerintahnya peduli. Juga untuk para negara-negara pendonor agar sadar akan kewajiban-kewajiban mereka sesuai dengan Konvensi Hak Anak-anak untuk membantu mencapai tujuan ini, seperti ikrar mereka di Dakar.

B. Koordinasi Peran Kelembagaan dalam Proses Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pengelolaan SD di Kota Banda Aceh Pasca Gempa dan Tsunami.

Kebijakan pemerintah Banda Aceh dalam menangani jumlah anak usia sekolah di wilayah tersebut yang tidak bersekolah, telah dilakukan dengan cara litas birokrasi. Pemerintah pusat dan daerah membuka peluang kemudahan bagi

setiap donatur untuk pembangunan pendidikan baik fisik maupun nonfisik, dalam bentuk bekerjasama lembaga non pemerintah lokal, nasional dan internasional.

Untuk memulihkan kembali sektor pendidikan di Banda Aceh, BRR bersama-sama dengan instansi-instansi terkait, lembaga sosial masyarakat (LSM/NGO) dalam dan luar negeri, serta lembaga-lembaga donor internasional lainnya mulai menyusun rencana rehabilitasi dan rekonstruksi di bidang pendidikan. Dalam implementasi di lapangan masih ditemukan perbedaan-perbedaan standar yang digunakan dan persoalan-persoalan lainnya yang membutuhkan kejelasan lebih lanjut.

Peran dari lembaga-lembaga internasional yang bergerak di bidang pendidikan telah menjadi salah satu faktor kritis yang lazim dijumpai pada negara-negara yang dilanda bencana maupun di negara berkembang yang ada dalam masa damai. Hubungan inilah yang akan kita telaah pada bagian ini.

Bagaimana cara seorang menteri pendidikan mengatur pendanaan dan aktivitas para pihak internasional? Mengapa seorang menteri pendidikan harus mengatur dan mengkoordinasikan berbagai kontribusi dari pihak luar dalam dunia pendidikan? berbagai pertanyaan tersebut merupakan tantangan yang harus dijawab oleh mereka yang menduduki posisi menteri pendidikan di negara berkembang.

Apakah pemerintah di negara-negara berkembang yang berada dalam kondisi damai sekalipun mampu mengkoordinasikan aktivitas pihak asing? Salah seorang ahli pendidikan yang memiliki banyak pengalaman dalam pendidikan di masa darurat maupun damai menyangsikan hal tersebut. Ahli tersebut

menyatakan, dalam konteks negara berkembang sekalipun, “sama sekali tidak nampak adanya upaya pemerintah untuk mengkoordinasikan pekerjaan NGO di bidang pendidikan. terkadang, mereka bahkan tidak memahami sama sekali apa yang telah atau sedang dilakukan oleh NGO. Pandangan ini memandang bahwa tanggung jawab atas kurangnya koordinasi dalam sektor pendidikan nasional berada di pundak pemerintah negara yang bersangkutan, bukan pada para pihak internasional yang bergerak di bidang pendidikan, ini merupakan pandangan berbeda dari apa yang terjadi di Mongolia; di mana peran pemerintahan nasional sangat bergantung pada dukungan asing.

Pemerintah Daerah yang dilanda gempa dan tsunami membawa orang-orang yang berbeda ke dalam rehabilitasi dan rekonstruksi dibidang pendidikan. Keikutsertaan mereka tidak pernah teratur bahkan penuh dengan kompetisi. Dengan pemikiran seperti ini, sangatlah penting untuk mengidentifikasi partisipan sentral dalam dunia kerja pendidikan selama dan sesudah masa darurat akibat gempa dan tsunami, dan juga inti dari kecenderungan mereka. Berikut ini bukanlah pembahasan yang komprehensif, tetapi sebuah kilasan siapa yang terlibat dan apa yang mereka lakukan, atau apa yang mereka cari untuk dilakukan. Bagian kesimpulan dari bab ini akan membahas mengenai kerangka dan pendekatan koordinasi kemanusiaan yang melibatkan para pejabat berdasarkan kantor pusat badan bantuan mereka. Ini juga akan memperlihatkan kenapa pendidikan tetap berada di luar diskusi koordinasi tingkat tinggi.

Peranan yang banyak dari para pelaku pengkoordinasian yang terlibat dalam pendidikan selama keadaan darurat dan awal-awal masa rekonstruksi sering

tidak sesuai sama sekali satu sama lain. Tugas khusus Perserikatan Bangsa-bangsa yang tumpang tindih, NGO yang menuntut kemerdekaan, pembatasan dari pemberian pendanaan donor, kebingungan dari pemegang pemerintahan nasional harus dilibatkan dalam pendidikan, kompetisi untuk mendapatkan perhatian media untuk menahan profil lembaga-lembaga yang hanya sekumpulan masalah yang dapat membatasi, menghalangi, atau bahkan menghapuskan kesempatan untuk kerja di sektor pendidikan yang dikoordinasikan secara efektif. Koordinasi yang sukses biasanya terjadi jika koordinasi tersebut dapat menyentuh hal-hal yang nampak tersebut.

Memahami pembatasan pengkoordinasian kemanusiaan membutuhkan pengantar mengenai pelaku utama, dan kilasan peranan yang mungkin mereka lakukan dalam bidang pendidikan. Kilasan berikut tidak begitu lengkap, sangatlah tidak mungkin untuk menggambarkan secara akurat perbedaan kecenderungan dan tujuan dari, sebagai contoh, kesatuan pelaku NGO yang sangat berbeda, untuk tidak mengatakan hal-hal dari sejumlah kecil badan Perserikatan Bangsa-bangsa, bantuan, pemerintah nasional, non-pemerintah, dan pelaku lainnya. Ini juga terbatas pada para aktor yang terlibat langsung dalam pendidikan, lingkungan dari peranan lainnya.

Situasi darurat dan pasca gempa dan tsunami seringkali membawa badan-badan multifungsi masuk ke sektor pendidikan. Biasanya koordinasi di antara badan-badan itu lemah, sehingga membuat kebijakan yang berbeda-beda di sekolah, permukiman atau wilayah yang berbeda, atau membuat kurang 'nyambung' antara keluaran dari tingkat pendidikan tertentu dan yang diterima ke

jenjang yang lain. Bisa ada beragam pendekatan terhadap kurikulum, untuk menggaji guru dan bahan lagi masalah lain. Koordinasi diperlukan pada level masyarakat, wilayah dan nasional melalui pertemuan reguler yang dipimpin oleh pejabat pendidikan nasional perwakilan badan PBB. Struktur komite koordinasi harus diatur dengan jelas di dalam rencana aksi pendidikan untuk semua orang antara lain; organisasi apa saja yang terlibat dalam pendidikan darurat atau pascakrisis?, aktivitas apa saja yang organisasi-organisasi itu lakukan?, bagaimana mekanisme koordinasi pada tingkat lokal, regional dan nasional?, peran apa yang diharapkan dari organisasi-organisasi itu di masa yang akan datang?, apakah ada persiapan pengalihan dari badan internasional ke mitra lokalnya?

Idealnya pendidikan diaerah yang dilanda gempa dan tsunami dikelola dengan semangat kerja sama dengan otoritas pendidikan daerah asal. Ini akan membuat pengungsi bisa mengikuti kurikulum, menggunakan buku ajar, dan mengikuti ujian sekolah. Hal ini juga akan memungkinkan pelatihan guru pengungsi dibuat sedemikian rupa sehingga memasukkan unsur-unsur yang dianggap esensial bagi pengakuan oleh Pemerintah. Mengingat adanya kemungkinan kesulitan politis dalam merealisasikan tujuan ini, maka bisa diminta bantuan dari UNESCO, UNICEF, dan UNHCR, yang memiliki mandat untuk memfasilitasi inisiatif negara dalam masalah-masalah seperti ini.

Misi pemberdayaan sangat rentan dengan penyelewengan dan sering menyebabkan setiap orang cenderung bertindak sendiri-sendiri sesuka hatinya daripada mandiri secara terkoordinasi. Tentu saja koordinasi yang efektif bersandar pada rencana-rencana yang jelas, yang dikomunikasikan dengan baik.

Jika usaha hendak dilakukan secara kolektif, pentinglah pemerintah mengkoordinasikan kerja setiap komenen yang terlibat dalam rehabilitaasi dan rekonstruksi pendidikan pasca gempa dan tsunami dengan cukup baik

Miner (1992) Koordinasi adalah pemanfaatan instrumen-instrumen kebijakan secara sistematis untuk menyampaikan bantuan kemanusiaan dengan cara yang kohesif dan efektif. Instrumen-instrumen yang dimaksud adalah termasuk perencanaan strategis, pengumpulan data dan pengelolaan informasi, mobilisasi sumber daya dan memastikan akuntabilitas, mengatur pembagian kerja berdasarkan fungsi, menegosiasikan dan mempertahankan kerangka kerja yang dapat dipergunakan dengan penguasa politik setempat dan memberikan bekal kepemimpinan

Tiga implikasi yang terkandung di dalam definisi ini, berikut dengan konteksnya, perlu mendapat perhatian, karena mereka akan muncul sebagai tema diskusi dalam risalah ini.

- (1) Koordinasi cakupannya luas, dan terutama berkaitan dengan pekerjaan manajemen dan penendalian. Mungkin aneh bila koordinasi mengandung setiap aspek yang dinyatakan di sini. Misalnya, sebuah upaya mobilisasi sumber daya, kebutuhan yang berbeda-beda, cenderung mengulangi informasi dan menyerukan dukungan dari badan-badan PBB, dan tidak memasukkan badan-badan non-PBB dalam prosesnya.
- (2) Koordinasi bagi PBB, dan ditunjukkan oleh fakta bahwa kebutuhan akan pendidikan telah menjadi fokus aktivitas PBB, membuat kita harus menaruh perhatian pada keunggulan badan-badan PBB dalam tugas koordinasi.

Kebanyakan komisi koordinasi, gugus tugas, dan sebagainya, didominasi oleh badan-badan PBB. Sebagian pihak non-PBB mungkin tidak merasa berkewajiban untuk berpartisipasi dalam, atau memilih untuk menjaga jarak dari usaha-usaha koordinasi PBB.

- (3) Kerja bersama pemerintahan nasional (*'host political authorities'*, penguasa politik setempat) didefinisikan sebagai komponen koordinasi. Ini hal yang signifikan pemerintah nasional tidak harus menjadi partisipan dan tentu saja bukan pemimpin dalam gerakan kemanusiaan yang terkoordinasi. Kedaulatan suatu negara mungkin terancam dengan adanya gerakan kemanusiaan, dan ini merupakan sesuatu yang tidak mudah dipecahkan. Sebagaimana Brown (2003:21) perhatikan: "Jika suatu negara tidak dapat memberikan keamanan warga negaranya sendiri maka bantuan kemanusiaan internasional menjadi sesuatu yang esensial." Pada saat yang sama, kehadiran operasi kemanusiaan di wilayah kekuasaannya mungkin tidak dapat duduk satu meja dengan pemerintah negara bersangkutan. Peran pemerintah nasional dalam gerakan terkoordinasi seringkali dipertentangkan orang.
- (4) Koordinasi dalam keadaan normal berbeda dengan koordinasi selama darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi. Dalam keadaan normal kata koordinasi mengimplikasikan kesetaraan dan harmonisan di antara unsur-unsur yang terlibat. Dalam *Webster's II New College Dictionary* (1999:248), *'co-ordinate'* didefinisikan sebagai "sesuatu/seseorang yang setara dalam ranking, kepentingan, atau derajat". Selama darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi menempatkan kekuasaan di tangan pemberi bantuan, baik dari

dalam negeri maupun dari luar negeri, dan melakukan kegiatan langsung kepada masyarakat yang terkena musibah tanpa menunggu perintah dari pemerintah setempat atau pihak lain. Koordinasi adalah pemanfaatan instrumen-instrumen kebijakan secara sistematis untuk menyampaikan bantuan kemanusiaan dengan cara yang kohesif dan efektif. Instrumen-instrumen yang dimaksud adalah termasuk perencanaan strategis, pengumpulan data dan pengelolaan informasi, mobilisasi sumber daya dan memastikan akuntabilitas, mengatur pembagian kerja berdasarkan fungsi, menegosiasikan dan mempertahankan kerangka kerja yang dapat dipergunakan dengan penguasa politik setempat dan memberikan bekal kepemimpinan. Dengan tanpa koordinasi, ada unsur berlebih-lebihan dan pemborosan, tapi *toh* tetap bisa efisien. Penyauran bantuan menempatkan kekuasaan di tangan pihak pemberi, dan karena tujuan pemberian membantu orang terkena musibah atas kehidupan mereka sendiri.

Akan tetapi, di masa darurat, pejabat yang sama memandang tindakan terkoordinasi oleh pihak kemanusiaan sebagai sesuatu yang memiliki maksud yang penting menjaga bantuan agar tidak tersentuh oleh para pihak yang tidak berkepentingan. Tanpa koordinasi, pemerintah lokal cenderung akan memanipulasi persaingan di antara badan-badan yang terlibat”, menggunakan bantuan untuk memberikan hadiah kepada para pendukungnya sambil menjaganya agar tidak tersentuh oleh pihak musuh dan karena itu “memperkuat agenda politik dan militer mereka”. Dalam pandangan sang pejabat ini, tujuan koordinasi selama darurat tidak ada kaitannya dengan peningkatan efisiensi atau efektivitas biaya.

Para aktivitas kemanusiaan perlu mengkoordinasikan langkah mereka untuk mencapai tiga tujuan: mencegah masyarakat semakin rapuh; memastikan bahwa aktivis kemanusiaan tidak melayani agenda politik dan militer pihak-pihak yang sedang berperang; dan menyelamatkan nyawa orang banyak.

C. Sistem Pengelolaan SD yang Relevan Dikembangkan di Banda Aceh

1. Nilai-nilai Dasar Sebagai Landasan Prinsipil Pengelolaan SD di Banda Aceh

UU.No.44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh. Pasal 3 Pendidikan Daerah adalah pendidikan yang berakar pada ajaran Islam yang bersumber dan Al-Qur'an dan Al-Hadist serta kebudayaan Aceh, dengan memperhatikan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh Pasal 4 Pendidikan Daerah bertujuan untuk membina dan mencerdaskan masyarakat untuk menjadi manusia yang beriman, bertaqwa kepada Allah SWT, berakhlakul karimah, berpengetahuan, berketerampilan, sehat jasmani dan rohani, berkepribadian mantap dan mandiri, memiliki tanggung jawab kepada Allah SWT, masyarakat dan negara, serta mampu menjawab berbagai tantangan global.

Prinsip kesempatan mendapatkan pendidikan dan aktifitas-aktifitas yang terkait untuk semua anak yaitu; hak atas kesempatan mendapatkan pendidikan, rekreasi dan aktifitas-aktifitas yang terkait harus dipastikan, bahkan di dalam situasi-situasi krisis. Hak ini tercantum di dalam Deklarasi Universal untuk Hak Asasi Manusia 1948 dan berbagai konvensi-konvensi hak asasi manusia,

diantaranya Konvensi anti Diskriminasi di dalam Pendidikan UNESCO tahun 1960, Perjanjian Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Kultural tahun 1966 dan Konvensi Penghilangan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita tahun 1979. Hal yang terbaru, terdapat di dalam Konvensi Hak Anak-anak tahun 1989. Konvensi ini mewajibkan setiap negara untuk menjamin hak anak-anak. Meskipun di dalam konvensi ini hanya untuk mereka yang kurang dari usia 18 tahun, tetapi tentu saja untuk mereka yang berusia lebih dari 18 tahun berhak juga untuk mendapatkan pendidikan, dan dokumen-dokumen hak asasi manusia tidak memiliki pembatasan ini. Banyak para remaja yang terganggu konflik baru sekolah di tingkat dasar ataupun menengah di usia belasan tahun (Margaret Sinclair, 2002).

Nilai-nilai dasar yang menjadi landasan prinsipil dalam pengembangan kebijakan pendidikan untuk Banda Aceh pasca tsunami Menteri Kebudayaan dan Pariwisata (Budpar) Jaro Wacik mengatakan bahwa pembangunan kembali Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Banda Aceh pasca gempa dan tsunami tidak boleh tercerabut dari akar kebudayaannya. "Kita ingin pembangunan Aceh tetap bersandar kepada nilai-nilai kultural Aceh," pengelolaan SD pasca gempa dan tsunami di Kota Banda Aceh, bersumber pada ketentuan pasal 3 UU.No.44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, yaitu pendidikan yang berakar pada ajaran Islam yang bersumber dan Al-Qur'an dan Al-Hadist serta kebudayaan Aceh.

Pemerintah diwajibkan untuk memberikan pendidikan penuh untuk para penduduk yang dilanda gempa dan tsunami yang terlantar. Hal ini akan sangat



sulit ketika terdapat konflik internal, namun paling tidak, pemerintah sebaiknya tidak mencegah komunitas dari organisasi sukarela untuk membantu mereka. Penting untuk memprioritaskan sumberdaya-sumberdaya pendidikan untuk para penduduk yang terlantar di pengungsian ketika mendapatkan bantuan dari luar negeri.

Dalam proses pembelajaran di SD ada sejumlah komponen yang diperkirakan memiliki pengaruh secara langsung, diantaranya faktor guru, faktor siswa, alat dan bahan yang tersedia serta faktor lingkungan.

2. Kurikulum yang Perlu Dikembangkan

Sangatlah penting bagi setiap negara untuk memelihara kurikulum dan materi inti pendidikannya, misalnya buku ajar dan petunjuk guru, sehingga mereka tidak akan hilang dalam situasi perang atau bencana nasional. Ini dapat dicapai melalui beragam mekanisme tradisional, menempatkan kumpulan materi ajar di beberapa lembaga nasional, regional maupun internasional. Seperti telah dibahas sebelumnya, guncangan akibat kondisi darurat memberikan suatu kesempatan untuk mengkaji ulang kurikulum dan membuat lagi yang baru. Beberapa isu kurikulum jangka pendek dan jangka panjang dibahas di bawah ini.

Usai suatu bencana alam seperti gempa dan tsunami, program sekolah harus disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan psikologis anak-anak dan anak muda yang kehidupannya baru saja mengalami guncangan (lihat di bawah). Guru atau *trainer* guru di wilayah yang besar kemungkinan terkena bencana alam harus dilatih jauh-jauh hari untuk mengantisipasi hal ini. Kurikulum juga harus

disesuaikan secara permanen untuk memasukkan unsur-unsur kesiapan menghadapi bencana di dalam kurikulum, memperkuat pengajaran geografi dengan pemahaman yang rinci tentang tipe-tipe bencana alam yang mungkin terjadi di wilayahnya, dan langkah-langkah pencegahan yang dapat diambil oleh keluarga.

Dalam situasi pengungsian, kurikulum harus sama dengan kurikulum negara pengungsi atau wilayah asal pengungsi dengan alasan familiaritas bagi anak-anak, sehingga para pengungsi dapat bekerja sebagai guru dan bisa mempercepat reintegrasi ke dalam sistem pendidikan nasional setelah kepulangannya (dalam situasi pengungsian jangka panjang, bisa saja ada kurikulum yang 'memiliki dua sisi', menguntungkan siswa pengungsi dengan memberikan hak bagi keluarganya untuk memutuskan tinggal di negara suaka, sementara yang lain akan kembali segera setelah kondisi memungkinkan). Yang krusial bagi siswa pengungsi ialah untuk memiliki kemampuan berbahasa untuk melanjutkan studi di negara mereka sendiri dan (jika keadaan darurat berlarut-larut) untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi di pengusian.

Kurikulum bagi anak-anak yang dilanda gempa dan tsunami perlu diperkaya dengan keterampilan-keterampilan dan nilai-nilai yang mempromosikan pemahaman atas peristiwa bencana, pencegahan atau meminimalan korban, mediasi, dan kewarganegaraan. Ini bisa tercapai dengan memperkenalkan modul untuk pendidikan yang sesuai dengan lingkungan, toleransi dan kewarganegaraan, yang diajarkan oleh guru-guru yang dilatih khusus. Situasi darurat berarti stress pada lingkungan, jadi sangatlah penting

untuk memperkuat unsur-unsur lingkungan dalam kurikulum, terutama yang berkaitan dengan aplikasi praktisnya. Sebuah satuan tugas bisa dibentuk untuk mempersiapkan rencana pengajaran yang bisa diterapkan secara lokal untuk tiap-tiap tingkatan sekolah

Situasi darurat bisa menimbulkan beragam kondisi yang mengancam keselamatan. Yang paling perlu diperhatikan ialah bencana yang diakibatkan oleh ledakan di daerah pertambangan.

3. Pengembangan Tenaga Kependidikan

Paling mudah mendapatkan guru untuk mengisi kekurangan guru di daerah-daerah korban bencana alam gempa dan tsunami di Banda Aceh adalah dengan mendatangkan guru dari luar Banda Aceh. Kalau mengharapkan guru yang berkualitas betul akan memakan waktu lama, maka sebaiknya didrop ke Banda Aceh guru-guru bantu. Tentunya, para guru bantu yang mengajar di Banda Aceh nantinya diprioritaskan menjadi PNS.

Kalau memindahkan guru negeri ke Banda Aceh pasti memakan waktu panjang, berliku-liku. Banyak saja alasan mereka untuk menolak dipindahkan ke Banda Aceh. Padahal, ketika mendaftar sebagai CPNS mereka sudah membuat pernyataan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia. Namun itu hanya teori, sementara dalam praktiknya sangat sulit memindahkan guru dari kota ke daerah, apalagi daerahnya tengah dilanda konflik dan bencana pula.

Guru dalam proses pembelajaran tingkat usia sekolah dasar memegang peran yang sangat penting, oleh karena pada usia ini, siswa masih banyak

memerlukan bimbingan dan bantuan orang lain yang lebih dewasa. Peran guru tidak dapat digantikan oleh perangkat-perangkat hasil teknologi. Masih banyak unsur manusiawi yang tidak mungkin dapat digantikan oleh perangkat lain semacam pengembangan sikap, nilai, motivasi, kebiasaan dan lain-lain.

Dalam proses pembelajaran, guru bukan hanya berperan sebagai model akan tetapi juga sebagai sutradara sekaligus sebagai aktor. Artinya, pada gurulah tugas dan tanggung jawab merencanakan dan melaksanakan pembelajaran di sekolah. Karena itu, keberhasilan suatu proses pembelajaran sangat ditentukan oleh kualitas atau kemampuan guru. *"One underlying emphasis should be noticeable: that the quality of the teacher is the one essential, constant feature in the success of any educational system"*, begitulah kata Norman Kirby (1981:26).

Memang, secara teoritis ada tiga aspek yang dapat mempengaruhi kualitas proses pembelajaran dilihat dari faktor guru, yaitu: *teacher formative experience, teacher training experience and teacher properties*.

Teacher formative experience, menurut Dunkin meliputi jenis kelamin serta semua pengalaman hidup guru yang menjadi latar belakang sosial mereka. Yang termasuk kedalam aspek ini diantaranya, meliputi tempat asal kelahiran guru termasuk etnik, latar belakang budaya dan adat istiadat keadaan keluarga. darimana guru itu berasal, misalkan apakah guru itu berasal dari keluarga, yang tergolong mampu stau tidak apakah mereka, berasal dari keluarga yang utuh atau tidak, apakah mereka berasal dari keluarga besar atau anak tunggal. Semua, itu dapat mempengaruhi kepribadian guru. Guru yang berasal dari keluarga. yang mampu secara, ekonomi akan berbeda, dengan guru yang berasal dari keluarga

tidak mampu; demikian juga, guru yang berasal dari keluarga yang utuh dan harmonis akan berbeda dengan guru yang berasal dari keluarga yang tidak utuh dan tidak harmonis. Demikian juga tempat asal kelahiran guru dapat mewarnai perilaku mereka, sebab mereka akan dipengaruhi oleh latar belakang budaya, adat kebiasaan mereka termasuk dialek dan gaya berbicara.

Teacher training experience, meliputi pengalaman-pengalaman yang berhubungan dengan aktivitas dan latar belakang pendidikan atau latar belakang akademik guru, misalkan pengalaman pelatihan profesional, tingkatan pendidikan, pengalaman jabatan, pengalaman selama guru mengikuti latihan keguruan termasuk program pendidikan guru, karakteristik guru (*instructor*) yang membimbing mereka selama mengikuti latihan keguruan dan lain sebagainya.

Teacher proferties, adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan sifat yang dimiliki guru. Yang termasuk kedalam aspek ini adalah sikap guru terhadap profesinya, sikap guru terhadap siswa, intelegensi, motivasi dan kemampuan mereka baik kemampuan dalam pengelolaan pembelajaran termasuk didalamnya kemampuan dalam perencanaan dan evaluasi maupun kemampuan dalam penguasaan materi pembelajaran.

Selain latar belakang guru seperti di atas, pandangan guru terhadap hakekat mata pelajaran yang diajarkannya dapat pula mempengaruhi proses pembelajaran. Guru yang beranggapan matapelajaran sebagai pengajar tentang fakta atau sejumlah konsep yang harus dibatalkan, akan berbeda dengan guru yang menganggap pelajaran sebagai alat (instrumen) untuk melatih siswa berpikir (*learning how to learn*). Dengan demikian, pandangan guru terhadap hakekat mata

pelajaran itu akan mewarnai gaya, model serta metoda pembelajaran yang digunakan.

Berkenaan dengan pengembangan jabatan profesi keguruan, pengembangan karier bagi guru merupakan keputusan yang mengakomodasi kebutuhan guru dalam mengembangkan diri dan kepentingan organisasi agar tumbuh dan berkembang seiring dengan kemajuan yang diperoleh dalam bidang pekerjaannya. Setiap guru, pada hakekatnya selalu ingin maju, tumbuh dan berkembang dalam pekerjaannya. Pada tahap awal karier keguruan, merupakan tahap pada saat memasuki sebuah organisasi. Ada tiga tahap yang dilalui yaitu: *Pertama*, tahap memasuki, dimana guru mencoba mendapat gambaran realistik mengenai organisasi dan mencari pekerjaan yang paling sesuai dengan keahlian, pengalaman, preferensi, dan minatnya. *Kedua*, tahap berlatih, yaitu tahap dimana guru mencoba menjadi partisipan yang dapat diterima oleh suatu kelompok kerja, menjalin hubungan dengan rekan sejawat dan penyelia, menunjukkan kompetensi dan menentukan peranannya.. *Ketiga*, tahap mengatur, yaitu tahap dimana guru menyelesaikan konflik-konflik di luar kehidupan kerja dan tuntutan dalam pekerjaan.

Hal yang mungkin timbul pada tahap awal karier sebagai guru seperti frustrasi dan ketidakpuasan karena harapan yang tidak sesuai dengan realitas, ketegangan antar guru senior dan junior karena perbedaan pengalaman, kebutuhan dan minat, dilema etis, dan sebagainya, sehingga menuntut individu untuk mengembangkan suatu orientasi dan memahami kemungkinan jalur karier untuk mencapai tujuan.

Pada karier pertengahan, merupakan tahap yang disebut stabilisasi, yaitu tahap dimana guru menerima tingkat tanggung jawab yang lebih tinggi dan menerapkan suatu rencana guru yang lebih berjangka panjang, adanya kemungkinan promosi, pengalaman baru. Tahap ini juga merupakan tahap pembentukan seseorang sebagai eksekutif dan mengembangkan level keahlian yang dapat bernilai tinggi bagi organisasi serta memberikan kontribusi orang tersebut dalam mencapai guru pribadi dan tujuan hidup di masa datang. Pada tahap ini setiap guru harus mengetahui bahwa pengetahuan dan kemampuannya sekarang ini kurang memungkinkan bagi tingkat kepuasan penampilan kerjanya. Oleh karena itu harus berusaha meningkatkan pengetahuan dan kemampuannya tersebut.

Pada tahap akhir karier sebagai guru, harus menerima keadaan menurunnya level kekuasaan dan tanggung jawab serta harus belajar menerima peranan baru sebagai mentor dan orang kepercayaan bagi mereka yang lebih muda. Dan akhirnya mulai melepaskan diri dari kerja dan bersiap untuk pensiun.

Fakta empirik yang dapat dijadikan dasar pemikiran dalam pengembangan tenaga kependidikan di Banda Aceh menunjukkan gambaran bahwa:

- (1) Implementasi kebijakan pengembangan ketenagaan di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh, secara kuantitatif baru pada taraf penempatan guru sementara (guru bantu). Upaya ini pun belum optimal karena kemampuan manajemen belum dapat menangani persoalan-persoalan yang dihadapi guru pasca gempa dan Tsunami. Pada aspek kualitatif setelah dilaksanakannya kebijakan otonomi khusus, pada umumnya guru masih

dihaapkan pada persoalan-persoalan trauma-psihis, di samping guru-guru yang melanjutkan pendidikan pun belum menunjukkan adanya penambahan.

- (2) Program-program pembinaan terhadap guru melalui berbagai penataran, upgrading, sosialisasi, masih belum dapat menghilangkan traumatik. Menawarkan tenaga potensial dan memenuhi persyaratan administratif maupun profesional yang tidak menduduki jabatan struktural untuk melanjutkan tingkat pendidikan, masih belum dapat direspon dengan baik;

Tujuan yang semestinya diupayakan untuk dicapai dalam pengembangan ketenagaan guru di Banda Aceh ialah:

- (1) *Peningkatan kualitas pelaksanaan tugas*, berkenaan pokok-pokok dan fungsi-fungsi yang harus diperankan masing-masing guru sesuai dengan bidang studi.
- (2) *Evaluasi Proses pelaksanaan tugas*, berkenaan dengan regulasi pelaksanaan tugas. Pada umumnya menyangkut aspek, yaitu:
 - (a) *Kehadiran di tempat kerja*, indikatornya: Guru datang, pulang dan berada di tempat kerja sesuai dengan peraturan yang berlaku kecuali sedang dinas luar;
 - (b) *Tanggungjawab terhadap tugas yang diberikan*, indikatornya: Guru tidak melemparkan tanggungjawab pekerjaan yang diberikan oleh atasannya kepada pihak lain;
 - (c) *Prakarsa/inisiatif*, indikatornya: Guru mampu bekerja dengan betul tanpa menunggu diperintah;

- (d) *Kejujuran kerja*, indikatornya: Guru tidak berbohong, bertindak curang, atau tindakan-tindakan lain yang sejenis sehubungan dengan pekerjaan yang dibebankan kepadanya;
 - (e) *Semangat kerja*, indikatornya: Guru bekerja tanpa mengeluh, gesit dan tidak malas;
 - (f) *Kemandirian*, indikatornya: Guru mampu bekerja tanpa penendalian yang ketat dari atasannya;
 - (g) *Moralitas kerja*, indikatornya: Guru mampu membedakan tindakan apa yang sebaiknya dilakukan dan dihindarkan sehubungan dengan statusnya sebagai guru;
 - (h) *Ketaatan kepada organisasi (disiplin)*, indikatornya: Guru mampu mematuhi aturan-aturan formal organisasi;
 - (i) *Kepemimpinan (leadership)*, indikatornya: Guru mampu berkomunikasi, berhubungan baik, dan mempengaruhi orang lain untuk melakukan suatu kegiatan;
 - (j) *Kerjasama*, indikatornya: Guru mampu bekerja bersama baik dengan atasan, rekan sejawat, maupun bawahannya;
 - (k) *Manajerial proses*, indikatornya: Guru mampu merencanakan, mengorganisir, mengarahkan, mengendalikan, memecahkan masalah, mengambil keputusan, dan mengevaluasi kegiatan.
- (3) *Evaluasi hasil langsung (Output)*, berkenaan dengan hasil langsung yang diperoleh dari pelaksanaan tugas. Pada umumnya menyangkut aspek kuantitas, kualitas dan efisiensi pekerjaan yang dilakukan guru yang

bersangkutan. *Kuantitas pekerjaan*, indikatornya: Jumlah hasil pekerjaan sesuai dengan yang harus dikerjakan; *Kualitas hasil kerja*, indikatornya: Mutu hasil pekerjaan sesuai dengan apa yang seharusnya; *Efisiensi*, indikatornya: Jumlah dan mutu hasil pekerjaan sesuai dengan sumber-sumber daya yang tersedia (tidak boros bahan, dana, waktu, SDM, dan sebagainya).

- (4) *Evaluasi hasil ahir (Outcomes)*, berkenaan dengan hasil ahir yang diharapkan dari pelaksanaan tugas. Pada umumnya diukur dengan aspek *loyalitas pada organisasi*, dengan indikator: Guru lebih mementingkan menyelesaikan tugas-tugas sekolah ketimbang urusan organisasi lain, atau urusan pribadinya.

Untuk mewujudkan guru yang berkualitas sebagaimana yang diharapkan dari keempat aspek evaluasi guru di atas, pihak manajemen mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pembinaan yang dapat memberikan arah dan bimbingan supaya guru mengenal kemampuan serta mengembangkannya dengan harapan dapat memanfaatkan potensi dan kemampuan dalam diri guru yang bersangkutan sehingga dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Dampak positif bagi pembinaan tersebut ialah adanya standar tegas yang dapat dipergunakan untuk mempertimbangkan para guru untuk menduduki jenjang jabatan tertentu, sehingga mendorong guru untuk memperbesar prestasi kerjanya.

4. Pengembangan Strategi Pembelajaran

Siswa adalah organisme yang unik yang berkembang sesuai dengan tahapan perkembangannya. Perkembangan anak adalah perkembangan seluruh aspek kepribadiannya, tetapi tempo dan irama perkembangan masing-masing anak

pada setiap aspek tidak selalu sama (Nasa Syaodih Sukmadinata, 1997:47). Proses pembelajaran dapat dipengaruhi oleh perkembangan anak itu disamping karakteristik lain yang melekat pada diri anak

Seperti halnya guru, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi proses pembelajaran dilihat dari aspek siswa meliputi aspek latar belakang siswa yang menurut Dunkin disebut pupil formative experiences serta faktor sifat yang dimiliki siswa (pupil properties).

Aspek latar belakang meliputi jenis kelamin siswa, tempat kelahiran dan tempat tinggal siswa, dari keluarga yang bagaimana siswa itu berasal, apakah dari keluarga yang menurut tingkat sosial ekonomi tergolong tinggi atau tidak, bagaimana keadaan keluarga siswa apakah orang tua mereka tergolong harmonis atau tidak atau malah siswa berasal dari orang tua yang cerai dan lain sebagainya. Semua yang melatar belakangi kehidupan siswa yang demikian akan mempengaruhi cara belajar mereka.

Aspek-aspek yang dapat mempengaruhi proses pembelajaran dilihat dari sifat yang dimiliki siswa meliputi kemampuan, pengetahuan dan sikap. Setiap siswa memiliki kemampuan yang berbeda-beda, yaitu berkemampuan tinggi, sedang, dan rendah. Perbedaan-perbedaan ini menuntut perlakuan yang berbeda pula baik dalam penempatan atau pengelompokkan siswa maupun perlakuan guru dalam menyesuaikan gaya belajar. Siswa yang memiliki pengetahuan yang memadai tentang penggunaan bahasa standar, misalnya akan mempengaruhi proses pembelajaran mereka dibandingkan dengan siswa yang kurang memiliki pengetahuan bahasa yang standar.

Sikap dan penampilan siswa di dalam kelas, juga merupakan aspek lain yang dapat mempengaruhi proses pembelajaran. Siswa ada yang sangat aktif dan ada pula siswa yang pendiam, tidak sedikit juga ditemukan siswa yang memiliki kesulitan belajar serta siswa yang memiliki motivasi yang rendah dalam belajar. Semua itu akan mempengaruhi proses pembelajar di dalam kelas. Faktor siswa dan guru merupakan faktor yang sangat menentukan dalam interaksi pembelajaran

Dilihat dari sudut perkembangan kognitif siswa sekolah dasar memiliki kekhasan tersendiri. Pada masa ini menurut Piaget anak berada antara masa operasional konkret (7-11 tahun) dengan masa operasional formal (11-16 tahun). Pada masa operasional konkret sudah dapat menyelesaikan tugas-tugas menggabungkan, memisahkan, menyusun, menderetkan, melipat dan membagi. Sedangkan pada masa operasional formal anak sudah mampu berpikir tingkat tinggi. Mereka sudah mampu berpikir secara deduktif, induktif, menganalisis, mensintesis dan berpikir abstrak. Kemampuan-kemampuan berpikir semacam inilah yang dapat mendorong anak untuk dapat memecahkan masalah. Oleh karena itulah, anak pada masa ini ditandai dengan tumbuhnya berbagai dorongan dan keinginan yang kuat untuk mengeksplorasi. Norman Kirby (1981: 60) menjelaskan bahwa anak pada, masa ini memiliki karakteristik sebagai berikut:

- (1) Adanya dorongan untuk berprestasi, bertanggung jawab dan berdirisendiri.
- (2) Adanya, dorongan atau hasrat untuk belajar dan eksplorasi.
- (3) Memiliki aktivitas berpikir, dan berimajinasi.
- (4) Semangat atau kegigihan untuk memperoleh sesuatu.

Dari beberapa karakteristik seperti diungkapkan Kirby, menunjukkan bahwa kegiatan belajar mengajar yang berpola pada pengembangan kemampuan berpikir sudah harus dilakukan sejak siswa usia sekolah dasar.

5. Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan

Sebagaimana diketahui, penyelenggaraan pemerintahan, termasuk di dalamnya bidang pendidikan, telah didesentralisasikan ke tingkat kabupaten/kota. Dalam pelaksanaannya, desentralisasi ini pun membawa persoalan-persoalan baru dalam tatanan manajemen pembangunan bangsa. Tentu saja, persoalan-persoalan tersebut merupakan tantangan bagi pelaksanaan otonomi daerah. Apakah dengan manajemen pendidikan yang didesentralisasikan kepada daerah dapat menjamin persoalan-persoalan tersebut dapat diselesaikan? Ataukah malah sebaliknya, sehingga kehidupan berbangsa dan bernegara semakin terpuruk?

Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh dan Nias menyarankan bahwa dalam jangka pendek, pembiayaan pendidikan seyogyanya diarahkan untuk melanjutkan investasi yang telah dilaksanakan di masa lalu, dan juga untuk melindungi kelompok masyarakat miskin dari dampak krisis. Dalam jangka menengah dan jangka panjang, perhatian seharusnya diarahkan kepada pencapaian pendidikan dasar yang menyeluruh dan persiapan untuk desentralisasi.

Pemerintah Daerah Kota Banda Aceh dituntut untuk membuat kebijakan agar peran serta masyarakat dalam memajukan pendidikan dapat tercapai dan terselenggara dengan baik sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang telah dicanangkan. Karena itu, kebijakan yang mungkin dapat dipikirkan adalah:

- (1) Menumbuhkan kesadaran, kemauan dan komitmen politik terhadap pembangunan pendidikan. Para pemimpin daerah, elit politik dan pembuat kebijakan serta para wakil rakyat seluruhnya mengakui betapa pentingnya peran dan fungsi pendidikan dalam pembangunan daerah. Namun pengakuan ini terbukti sulit diterjemahkan dalam pembuatan keputusan dan dalam aksi nyata. Karenan salah satu solusinya adalah tekanan-tekanan dan loby dari tokoh-tokoh masyarakat, dari organisasi profesi, dan dari para pendidik serta masyarakat perlu dibangun dan perlu disusun secara sistematis sehingga menjadi kekuatan politik yang memiliki kemampuan untuk merubah dan menumbuhkan kesadaran, kemampuan politik dan komitmen untuk memperjuangkan dengan nyata keputusan-keputusan yang mendorong terwujudnya penyelenggara pendidikan seperti yang diharapkan masyarakat.
- (2) Menggali sumber-sumber dana alternatif untuk membiayai pendidikan di daerah. Penggalan sumber dana alternatif ini perlu dilakukan antara lain sumber dana perpajakan yang menjadi aset daerah.

Sistem pajak merupakan salah satu alat yang penting dalam kebijakan pembangunan di setiap daerah. Hal ini termasuk pula pembangunan dalam pendidikan. Pajak tersebut diperlukan untuk menyediakan dana bagi pemerintah daerah untuk memperoleh barang-barang atau jasa-jasa agar pemerintahan di daerah berjalan sebagaimana yang diharapkannya, dan juga dana yang di dapat dari pajak dapat dialokasikan untuk menjalankan program pendidikan yang telah ditetapkan.

Jika dari pendapatan daerah tersebut dapat disisihkan untuk pendidikan dan pengaturannya diatur melalui peraturan daerah, maka pembiayaan pendidikan untuk daerah tersebut sudah teratasi. Institusi pendidikan pun dapat menciptakan sumber dana sendiri melalui produk unggulan yang dapat dipasarkan. Temuan-temuan hasil penelitian dari berbagai fakultas suatu universitas umpamanya, dapat ditawarkan kepada berbagai industri atau bisnis untuk dipasarkan. Karena itu, *networking* dan kerja sama dengan dunia perguruan tinggi merupakan salah satu unsur pokok dalam penggalan sumber-sumber dana alternatif.

Kebersamaan dalam mengelola pendidikan di daerah merupakan wujud upaya mengembangkan kemandirian pengelolaan pendidikan, sehingga pemberdayaan semua potensi untuk membiayai pendidikan dapat dibangun. Sumber-sumber daya masyarakat terutama yang dapat digali dari berbagai sumber daya alam yang ada dan mungkin diadakan di lingkungan seperti potensi perekonomian lokal, dan berbagai keunggulan yang ada di masyarakat, sehingga pendidikan dirasakan merupakan kebutuhan dan urusan serta tanggungjawab bersama. Dengan demikian sumber-sumber dana pendidikan dapat diperkaya dan tidak hanya tergantung dari sumber dana pemerintah semata.

Adapun kelompok masyarakat yang dapat atau harus berpartisipasi dalam meningkatkan pendidikan adalah: (1) kelompok organisasi profesi; (2) kelompok atau organisasi yang mempunyai hubungan atau kaitan penyelenggara pendidikan dan kebudayaan baik secara langsung maupun tidak langsung; (3) kelompok-kelompok khusus dalam masyarakat seperti LSM sebagi lembaga sosial; (4) institusi pemerintah di luar pemerintah daerah, dan sebagainya.

Salah satu bentuk kontribusi masyarakat dalam pendidikan adalah dengan munculnya lembaga-lembaga satuan pendidikan swasta, baik pada tingkat persekolahan maupun pada tingkat luar persekolahan. Hal tersebut perlu dan harus menerima perlakuan yang lebih menggembirakan dibandingkan perlakuan yang diberikan pada saat ini. Pembinaan mutu, manajemen, fasilitas dan kurikulum merupakan tiga hal penting dalam mengembangkan lembaga satuan pendidikan swasta yang berimplikasi terhadap pembiayaannya.

Penggalian sumber-sumber dana alternatif terutama baik untuk sekolah-sekolah negeri maupun swasta dalam upaya mengatasi persoalan keterbatasan dana, harus digalakkan, dan peluang untuk kepentingan ini perlu diciptakan melalui peraturan yang lebih mendorong dan tidak menghambat atau mempersulit. Cara untuk mendorong terbukanya sumber dana alternatif tersebut dapat dilakukan dengan melakukan *marketing* produk unggulan sekolah, kegiatan konsultasi, pemasaran berbagai hasil kerja perguruan tinggi seperti berbagai produk inovasi hasil pendidikan.

Bagi seorang administrator pendidikan harus dapat memahami suatu pendanaan dari sistem-sistem penghasilan atau pendapatan pada seluruh tingkat pemerintahan. Di samping itu, harus dapat pula menciptakan usaha yang berguna untuk meningkatkan pendapatan agar persekolahan dapat berjalan dan berkembang sesuai dengan yang diharapkan.

Dalam mengelola jenis pengeluaran yang akan dibelanjakan oleh suatu persekolahan, setiap pengeluaran harus seimbang dengan pendapatan yang diterimanya, karena antara pendapatan dan pengeluaran mempunyai sumber yang



berbeda. Oleh karena itu, jika pengelolaan antara pendapatan dan pengeluaran kurang baik maka akan mengakibatkan kerugian bagi persekolahan, jika pengelolaan dalam pengeluaran atau pendapatan tidak diawasi secara cermat.

Model pembiayaan untuk sekolah begitu beragam. Untuk melihat model mana yang paling baik bisa dievaluasi secara matematik, tapi juga sifat-sifat tertentu dari penetapan atau ketentuan-ketentuan dalam pembiayaan sekolah ini yang tidak dapat dievaluasi dengan formula-formula matematika dan simulasi komputer. Jadi hanya bisa dinilai oleh suatu daftar atau seperangkat kriteria untuk mengidentifikasi keseluruhan karakteristik dari suatu program pembiayaan sekolah yang memuaskan.

Perhitungan alokasi biaya untuk pelaksanaan program sekolah akan langsung berhubungan dengan alokasi komponen biaya yang akan dikeluarkan dalam menjalankan proses pendidikan tersebut, maka salah satu komponen penting bagi terciptanya proses pendidikan yang baik adalah dengan adanya partisipasi masyarakat. Partisipasi tersebut sangat berarti bagi tercapainya tujuan pendidikan yang sesuai dengan perumusan visi dan misi lembaga pendidikan.

6. Sistem Pengendalian Pengelolaan SD

Konsep umum mengenai penendalian, dimaksudkan untuk menjaga agar ada persesuaian antara kegiatan pelaksanaan dengan rencana dan tujuan yang ditetapkan. Dengan demikian penendalian adalah kegiatan manajer dalam organisasi atau koordinator dalam kelompok atau unit kerja, yang mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan atau

hasil yang dikehendaki. Penendalian dilakukan, karena suatu rencana dan pelaksanaan operasional tidak atau kurang sesuai dengan arah yang ditentukan untuk mencapai hasil yang diharapkan. Penendalian terdiri daripada proses yang dibentuk oleh tiga macam langkah-langkah yang bersifat universal, yakni: (1) mengukur hasil pekerjaan; (2) membandingkan hasil pekerjaan dengan standar dan memastikan perbedaan (apabila ada perbedaan); (3) mengoreksi penyimpangan yang tidak dikehendaki melalui tindakan perbaikan.

Di antara tolok ukur yang ada, yang dapat digunakan untuk menilai apakah pekerjaan dilakukan secara terkoordinasi secara terpadu atau tidak, adalah rencana dan prosedur. Oleh karena itu agar manajer atau koordinator dapat mendukung terciptanya koordinasi dapatlah melakukan penendalian melalui jalannya pelaksanaan rencana dan prosedur. Pada akhirnya dalam menciptakan kerja sama akan terletak pada manusianya juga. Dengan rencana yang baik pun, prosedur dan penendalian yang dilakukan belum tentu akan menghasilkan kerja sama yang mantap sepanjang manusia-manusianya belum berpengetahuan, berkemauan dan berkemampuan untuk melaksanakan proses-proses kerja sama. Oleh karena itu perubahan perilaku manusia, baik para manajer atau para tenaga pelaksana pada setiap unit-unit organisasi, sangatlah penting. Perubahan sikap ini tidak mungkin berjalan serentak, melainkan melalui masa perolehan pengetahuan (pendidikan dan latihan), pengertian, pemahaman dan apresiasi tentang pentingnya tujuan kerjasama untuk mencapai tujuan dan sasaran sesuai dengan kebutuhan, keinginan dan harapan semua pihak.

Menghadapi perkembangan kemajuan ke depan, pihak manajemen dapat melakukan proses perubahan atau pembaharuan yang diwujudkan melalui perencanaan yang matang, pelaksanaan yang tepat, dan penendalian yang ketat.

Perencanaan yang matang, mengandung arti bahwa faktor yang paling penting adalah ketepatan dalam menentukan sasaran. Setiap lembaga pendidikan, dalam menyusun rencana kelembagaannya harus melibatkan unit-unit terkait ekstern maupun intern. Oleh karenanya faktor koordinasi memainkan peranan penting. Rencana yang matang pada prinsipnya menentukan kegiatan apa yang akan dilakukan, kapan dilakukan dan dimana dilakukan serta bagaimana kegiatan tersebut harus dilakukan. Lembaga pendidikan sebagai suatu institusi terpadu dalam pelayanan kebutuhan, keinginan dan harapan masyarakat, dalam perencanaan pelayanannya haruslah bersifat proaktif, integratif, dan sinkron dengan kepentingan-kepentingan instansi terkait, termasuk masalah SDM, biaya, sarana dan prasarana, serta penggunaan sumber-sumber lain yang diperlukan dalam rangka pencapaian tujuan-tujuan pendidikan. Di antara langkah yang cukup penting dalam perencanaan tadi, ialah melaksanakan *need assesment* dan identifikasi faktor-faktor penghalang, terutama faktor yang menyebabkan timbulnya kegagalan dan atau kurangberhasilan di masa lalu.

Pelaksanaan yang tepat, berkenaan dengan pengorganisasian dan koordinasi, serta kejelasan unit-unit atau instansi-instansi yang dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan. Oleh karena itu batas wewenang, tugas dan tanggung jawab dari masing-masing unit harus dirumuskan secara jelas dan tegas. Suatu hal yang harus disadari, ialah karena dengan pelaksanaanlah suatu organisasi semakin

didekatkan kepada tujuannya. Dengan kata lain, jelasnya tujuan, matangnya rencana, tepatnya penjabaran rencana dalam program dan kemampuan memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada masih harus dicerminkan oleh kegiatan operasional yang efektif dan efisien. Untuk mencapainya tiada lain semua instansi yang terkait harus mempunyai komitmen dan konsistensi terhadap visi, misi, prinsip, tujuan dan strategi yang telah ditetapkan. Artinya, dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan, semua pihak harus berpedoman pada rencana yang ditetapkan dan hal-hal yang telah disepakati bersama secara konsekuen.

Penendalian yang melekat, mengandung arti bahwa karena sifat manusia yang tidak sempurna dan mempunyai banyak kekurangan-kekurangan, efektivitas organisasi menuntut terdapatnya sistem penendalian yang dalam fungsi-fungsi manajemen. Kegiatan penendalian sudah harus dilaksanakan sejak tahap perencanaan, untuk menghindari kekeliruan perencanaan. Oleh karena itu, penendalian yang melekat dengan fungsi manajemen harus mencakup penendalian terhadap berfungsinya setiap komponen yang ada di dalam organisasi, berjalannya secara tepat berdasarkan prosedur, mekanisme dan tata hubungan kerja dan penampilan kinerja organisasi sesuai dengan visi, misi dan tujuan yang harus dicapai.

Pemantauan dan evaluasi yang dilakukan hendaknya diarahkan pada upaya penumbuhan dan pendampingan pelaksanaan program, yang sesuai dengan kebutuhan, keinginan dan harapan masyarakat, serta potensi masyarakat yang dimilikinya. Alur pelaksanaan pemantauan dan evaluasi yang dilakukan lembaga pemantauan dan evaluasi pihak pemerintah digambarkan berikut ini.

Maksud pemantauan dan evaluasi ini ialah untuk menemukan informasi pengelolaan pelaksanaan program yang dilaksanakan lembaga pendidikan yang diberi bantuan sebagai bahan masukan dalam memberikan bantuan pembinaan teknis, dan atau pendampingan, serta untuk mengembangkan model pelaksanaan program yang sejenis lebih lanjut.

Berdasarkan maksud tersebut, maka tujuan yang ingin diperoleh dari pemantauan dan evaluasi ialah dapat menemukan data tentang:

- (1) Kinerja kelembagaan sebagai unit pelaksana program baik secara individual maupun kelembagaan dalam melaksanakan program pembantuan yang mencakup: (1) Proses manajemen pelaksanaan program, (2) hasil langsung (*output*) yang diperoleh, dan (3) hasil ahir (*outcomes*) yang diinginkan.
- (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan program yang mencakup: (1) Faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan program, dan (2) faktor penghambat keberhasilan pelaksanaan program.
- (3) Upaya dan cara-cara yang dapat dilakukan untuk memperbaiki dan mengatasi hambatan, serta upaya mengembangkan dukungan-dukungan dalam mencapai keberhasilan program, yang mencakup: (1) Upaya dan cara-cara pencegahan dan perbaikan, dan (2) upaya dan cara-cara yang bersifat pengembangan.

Sasaran dari kegiatan pemantauan dan penilaian program adalah kinerja pelaksana program baik sebagai perorangan maupun kelembagaan. Kinerja perorangan diarahkan pada penanggungjawab program, unsur pimpinan proyek,

dan unsur pelaksana proyek, seperti seperti staf, guru, pamong belajar, tutor, dan lainnya; Sedangkan kinerja kelembagaan diarahkan pada unsur-unsur pengelola, seperti para kepala unit atau satuan pendidikan, unsur pembina dan pengawas, unsur mitra kerja, dan kelompok masyarakat.

Pemantauan program dimaksudkan untuk memperoleh gambaran kemajuan pelaksanaan program, khususnya yang berkaitan dengan: (1) pencapaian target program, (2) hasil-hasil yang diperoleh, (3) masalah dan hambatan yang ditemui, (4) upaya pemecahan dan supervisi yang dilakukan, (5) implikasi terhadap sektor lain, dan (6) rencana tindak selanjutnya.

Aspek-aspek yang diawasi pada setiap tahap antara lain: Tahap persiapan yang dimulai dengan proses sosialisasi dan pelatihan, tahap pelaksanaan, dan tahap pasca pelaksanaan, serta mekanisme pembinaan yang dilakukan oleh unsur-unsur pembina. Pada *tahap persiapan*, berkenaan dengan materi yang menjadi substansi program, peserta dan sasaran program, fasilitator dan pelaksana, jadwal waktu, tempat, dan penggunaan biaya; Pada *tahap pelaksanaan*, berkenaan dengan penyediaan dan pendayagunaan sarana/prasarana, pembimbingan, pemantauan, dan fasilitasi; Tahap *pasca pelaksanaan program*, berkenaan dengan evaluasi dan pengukuran hasil-hasil yang diperoleh, dan rencana keberlanjutan program. Tahap *pembinaan dan pendampingan* berkenaan dengan peningkatan peran pemeran pelaksana pendamping program di lapangan, khususnya yang berkenaan dengan materi pembinaan, jadwal dan tempat pembinaan, peran para pembina, mitra kerja dan unsur pemerintah daerah.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan program penendalian kelembagaan, berkenaan dengan: (1) Faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan program, berkenaan dengan potensi dan peluang yang dimiliki sasaran dan pelaksana program; Diukur dengan aspek *relevansi program* kegiatan/usaha dengan kebutuhan anak didik/*stakeholders*. Indikatornya: para pelaksana program pendidikan dapat dan mampu memberikan fasilitasi bagaimana warga belajar menemukan potensi dan peluang yang dimilikinya; (2) Faktor penghambat keberhasilan pelaksanaan program, berkenaan dengan kelemahan-kelemahan dan kemungkinan ancaman yang dihadapi sasaran dan pelaksana program; Diukur dengan aspek *kelaikan program* kegiatan/usaha dengan situasi dan kondisi lingkungan. Indikatornya: para pelaksana program pendidikan dapat dan mampu melakukan fasilitasi bagaimana warga belajar dapat menyadari kelemahan-kelemahan dan ancaman yang dihadapinya, serta dapat mengantisipasi kemungkinan yang akan menjadi hambatan.

Upaya dan cara-cara yang dapat dilakukan untuk memperbaiki dan mengatasi hambatan, serta upaya mengembangkan dukungan-dukungan dalam mencapai keberhasilan program antara lain: (1) Upaya dan cara-cara pencegahan dan perbaikan, berkenaan dengan upaya dan cara-cara pencegahan dan perbaikan yang langsung dilakukan pada saat kesalahan dan penyimpangan ditemukan; Diukur dengan aspek *inisiatif dan kreativitas dalam membuat keputusan*. Indikatornya: para pelaksana program pendidikan mampu mengambil keputusan serta dapat memberikan solusi pencegahan dan perbaikan langsung kepada sasaran program pada saat kesalahan dan penyimpangan ditemukan; (2) Upaya

dan cara-cara yang bersifat pengembangan, berkenaan dengan upaya dan cara-cara mengembangkan dan meningkatkan aspek-aspek program yang sudah dianggap baik atau berhasil. Diukur dengan aspek *semangat, tanggung jawab, keinginan untuk maju, dan keberanian mengambil resiko*. Indiktornya: para pelaksana program pendidikan mampu merumuskan alternatif-alteratif yang memungkinkan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan program yang dibinanya.

Berkenaan dengan evaluasi terhadap suatu program peningkatan mutu pendidikan merupakan salah satu sub-sistem pendidikan yang memiliki peranan setara dengan sub-sistem pendidikan lain di lembaga pendidikan. Evaluasi tidak hanya terdiri atas serpihan-serpihan informasi mengenai kegiatan pendidikan, akan tetapi secara konfiguratif menjelaskan kaitan fungsional antar sub sistem yang ada pada kegiatan pendidikan.

Evaluasi hasil belajar dimaksudkan untuk mengetahui tingkat perkembangan belajar murid, dengan mengurangi atau menekan supaya tidak terjadi putus sekolah. Evaluasi hasil belajar harus menjadi dasar untuk perbaikan dan peningkatan mutu hasil belajar. Dengan demikian diupayakan tidak terjadi pengulangan perolehan prestasi rendah yang akan berkulminasi dalam putus sekolah. Untuk mencapai tujuan tersebut evaluasi hasil belajar tidak lagi semata-mata berfungsi reproduksi informasi melainkan harus berfungsi diagnostik.

Pada gilirannya hasil evaluasi hasil belajar akan menggambarkan mutu pendidikan dasar secara keseluruhan. Dengan asumsi bahwa mutu pendidikan, dengan indikator mutu hasil belajar, merupakan gambaran dari tingkat ketercapaian tujuan dan penguasaan murid atas isi yang dipelajari maka penilaian

hasil belajar tetap harus berorientasi kepada tujuan dan isi. Demikian pula substansi dan kriteria evaluasi akan terletak dalam perubahan perilaku yang berkaitan dengan tujuan dan isi pelajaran.

Dalam lingkup mikro pelaksanaan kurikulum akan dinyatakan dalam proses pembelajaran. Oleh karena proses belajar mengajar itu adalah proses inkuiri yang melibatkan guru, maka proses pembelajaran yang berkualitas akan diawali dengan keputusan instruksional yang relevan dengan tuntutan kurikulum. Asumsi ini memandang guru menjadi pihak pengguna kurikulum, dan karena dia sebagai pengguna kurikulum maka guru diasumsikan akan mengetahui hingga mana tuntutan-tuntutan dari kurikulum itu dapat diimplementasikan. Atas dasar asumsi diatas, salah satu pendekatan alternatif evaluasi implementasi kurikulum ialah pendekatan yang berorientasi kepada pengguna (*useroriented*).

Dalam jangkauan yang lebih jauh evaluasi implementasi kurikulum harus *built-in* sebagai tugas guru, sehingga evaluasi implementasi kurikulum tidak lagi bersifat eksternal melainkan bersifat internal dan *naturalistic*. Substansi dan kriteria evaluasi implementasi kurikulum akan terkait dengan aspek-aspek kesesuaian isi pembelajaran dengan tujuan dan fungsi pendidikan dasar, interaksi dan tugas-tugas pembelajaran, rentang waktu belajar, sistem evaluasi proses dan hasil belajar, serta sumber-sumber belajar.